© 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi ISSN : 2622-2310

**JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Volume 4 Issue 2 (2021) : 39 - 42 Diterima 1/10/2021 Disetujui 8/11/2021

**Infrasturktur Sebagai Moda Pembangunan Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Erike Aprilia Sucipto1)

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur; e-mail : ErikaSucipto@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

The difference in infrastructure between regions is considered to be one of the driving factors for economic differences between regions. For Indonesia, this issue deserves to be studied, especially since the government is currently actively promoting infrastructure development in various regions in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of infrastructure and economic differences between regions (provinces) in Indonesia and to examine the relationship between the two. This study uses several methods, namely Williamson index, Clarkson taxonomy, correlation and regression analysis. This method is expected to provide sufficient analytical space to analyze and investigate trends and linkages in infrastructure development and economic differences between various regions in Indonesia. The study found that between 2011 and 2015, economic inequality (GRDP per capita) between provinces in Indonesia was quite high. The results showed that during the 2011-2015 period, the level of economic inequality between provinces in Indonesia was relatively high (GDP per capita). This is reflected in Williamson's GDP per capita (between 0 and 0).

Keywords : **gap, development, infrastructure**

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja ekonomi suatu negara. Tanpa pertumbuhan yang positif, akan sulit bagi negara untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Mengejar pertumbuhan ekonomi saja bisa menghasilkan ketidakadilan yang berujung pada ketimpangan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir pembangunan. Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah mengatasi ketimpangan yang tidak hanya terjadi di tingkat individu atau keluarga, tetapi juga di daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, namun di saat yang sama tingkat ketimpangan pendapatan juga tinggi. Data kemiskinan dari tahun 1970 hingga 2017 menunjukkan bahwa rata-rata angka kemiskinan di perkotaan adalah 13,9%, sedangkan rata-rata angka kemiskinan di perdesaan adalah 19,0% (BPS, 2018).

Banyak dokumen yang menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ketimpangan di Indonesia, salah satunya adalah perbedaan pembangunan infrastruktur antardaerah. Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas infrastruktur di suatu daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi (Calderón & Servén, 2004; Démurger, 2001; Maryaningsih, Hermansyah dan Savitri, 2014).

Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya seharihari. Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat digunakan untuk lebih mengenal dan juga dapat digunakan untuk memahami karakter penelitian kualitatif, dengan digunakannya metode kualitatif ini dapat lebih mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data penelitian sesuai tema. Metode kualitatif ini dirasa cocok untuk permasalahan yang akan diteliti ini karena diperlukan analisa yang lebih mendalam untuk permasalahan terkait dengan pembangunan sumber daya mansusia dengan strategi budaya di Desa Plunturan.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Desa ini berada di sebelah timur dari Kabupaten Ponorogo, memilih di Desa ini adalah karena salah satu yang melakukan acara *“selawenan”* hanya di Desa Plunturan. Waktu yang digunakan di dalam penelitian ini adalah satu bulan pada bulan Februari setelah proposal disetujui.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbatasan wilayah Desa Pandak dengan Desa Bulak ditandai dengan adanya sebuah sungai. Akses kedua wilayah tersebut terhubung oleh sebuah jembatan kecil dimana warga dapat melaluinya menggunakan sepeda motor saja. Jembatan tersebut sangat berpengaruh pada kelancaran perekonomian warga karena sebagai sarana penyebrangan jika ingin pergi ke pasar atau untuk menuju kota dimana para warga bisa berdagang. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo mengucurkan program bantuan Rp. 300 juta untuk pemerataan dan pembangunan infrastruktur di desa. Salah satunya Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang mengalokasi progam Rp. 300 juta tersebut untuk pembangunan infrastruktur di desa setempat.

Beberapa waktu yang lalu sempat ramai di media sosial tentang pemberitaan wujud jembatan kayu yang katanya menelan dana 200juta. Warganet heboh dengan hal itu dan beramai-ramai memberikan komentar negatif yang ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Setelah ditelurusi, ternyata unggahan tersebut tidak tepat.

Anggaran untuk pembuatan jembatan justru malah lebih besar daripada itu, yaitu 500juta. Akan tetapi dana yang turun sampai saat itu masih 200juta dan itupun hanya cukup untuk pembangunan pondasi. Karena masyarakat merasa akses mereka terganggu dengan adanya jembatan yang belum selesai pengerjaannya itu, masyarakat mempunyai inisiatif untuk membuat ‘sesek’ sementara agar jembatan tersebut dapat dilewati oleh warga, mengingat jembatan tersebut adalah satu-satunya akases untuk pergi ke desa sebelah.

Dari persoalan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sampai saat ini, infrastruktur yang memadai bagi setiap daerah belum juga merata. Masih banyak daerah daerah terpencil lainnya yang dapat dikatakan sangat minim infrastrukturnya. Minimnya infrastruktur disebuah daerah juga dapat menghambat perekonomian warga setempat dan juga sebagai tanda pembangunan di Indonesia masih sangat buruk.

**KESIMPULAN**

Kebijakan pemerinttah untuk menyelenggarakan pembangunan yang dimulai dari desa-desa dapat dikatakan sudah sesuai. Tetapi disisi lain pemerintah terlalu menggalakkan kebijakan pembangunan itu di bidang ekonomi, tetapi tidak pada pembangunan manusia. Sehingga mutu SDM juga masih rendah untuk siap menjadi tenaga kerja dari masyarakat pedesaan.

Tetapi kebijakan tersebut dirasa tepat karena memang desa juga membutuhkan pembangunan dari sisi infrastrukturnya, yang pasti itu akan mempermudah akses keluar masuk desa, dan juga dapat menunjang perekonomian masyarakat karena akses untuk jual beli juga melalui jalan. Sedangkan untuk permasalahan Dusun Pandak ini, masyarakatnya dapat dikatakan Makmur, mereka juga memiliki sawah mereka sendiri. Meskipun ada sebagian yang menggarap sawah milik orang lain. Kebutuhan mereka masih dapat ditunjang dengan desa yang terdekat disana, meskipun sudah masuk Kabupaten Ponorogo, mereka masih memiliki rasa kemanusiaan untuk saling membantu, dan saling berinteraksi layaknya *Gemeinschaft by place* menurut Ferdinand Tonnies.

**DAFTAR PUSTAKA**

Jamaludin, Adon Nasrullah. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Pustaka Setia: Bandung

Muh. Zainul Arifin. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, *1*(1), 1–21.

http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhiang/issue/view/1/Hala man 1-21

Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Mediatrend*, *10*(1), 19–31.

(http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/687)

Bajar, S., & Rajeev, M. (2016). The impact of infrastructure provisioning on inequality in India: Does the level of development matter? Journal of Comparative Asian Development, 15(1), 122–155. doi:10.1080/15339114.2016.1150188.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan

Garis Kemiskinan, 1970-2017. Badan Pusat Statistik. Retrieved from

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin--persentase- penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan--1970-2017.html.

Bhinadi, A. (2003). Disparitas pertumbuhan ekonomi Jawa dengan Luar Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(1), 39–48. Retrieved from http://journal.uii.ac.id/JEP/article/view/638.

Calderón, C., & Servén, L. (2004). The effects of infrastructure development on growth and income distribution (Working Papers No. 3400). Working Papers No. 3400. doi:10.1596/1813-94503400.